

dipimpin berdosa. Argumen tersebut dikarenakan laki-laki diletakkan di atas perempuan.⁹

Dalam hal ini pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan porsi masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.¹⁰

Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh Undang-undang ini terhadap suami adalah kewajiban memberi nafkah.¹¹

Berikut ini adalah hak dan kewajiban yang diperoleh oleh seorang suami :

- a. Istri wajib melayani suaminya.
- b. Mendidik anak-anaknya.
- c. Istri harus menyambut suaminya dengan senyuman dan wajah yang berseri.
- d. Suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara baik, meliputi pakaian dan tempat tinggal.¹²

⁹ Paparan dari Wahbah Zuhaili, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 69.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 115-116.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2014), 547-548.

¹² Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensikloedi Islam Kaffa*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2013), 927.

d. Istri berhak membelanjakan harta

Istri berhak membelanjakan harta pemberian suami guna melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik maka harus mengatur masalah keperluan sehari-hari. Dan istri berhak membelanjakan harta pemberian dari suami maupun harta yang dibawa, diperoleh sebelum adanya perkawinan untuk memenuhi kebutuhan istri.¹⁵

e. Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya

Pasal 33 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Pasal 77 Ayat (1) dan (2) berbunyi “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Istri dalam mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya itu diantaranya, seorang wanita bangga akan dirinya seperti juga seorang pria ia ingin dihormati orang yang lain.¹⁶

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hak dan kewajiban suami istri Pasal 77:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

¹⁵ Ibid., 90.

¹⁶ Ibid., 157.

orang-orang yang menghinannya.¹⁹ Dan Pasal 83 menyebutkan “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik-baiknya” peranan sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam alquran dan hadits. Sebagai ibu rumah tangga perannya lebih ditekankan pada usia pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga sakinah. Ibu yang melahirkan, merawat dan memelihara anak. Perannya sangat penting dalam mencetak generasi penerus. Sebagai ibu harus bertanggung jawab dalam mendidik anak agar anaknya menjadi orang yang beriman dan terhindar dari siksa neraka.²⁰

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

Pasal 30:

“ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ”.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

¹⁹ Dedi Jumaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Phademna Presindo, 2001), 114-116

²⁰ Muhammad Kodari, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insasi Press, 1999), 60

Allah, melampau suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka istri tidak berhak mendapatkan hak ini.²⁴

Istri wajib bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, dan dalam berpakaian baik untuk mereka maupun untuk anak-anak mereka. Bukankah hal itu dapat merusak, sesungguhnya hal itu dapat membuat cemburu, karena sebagian tetangga kerabat melakukannya. Allah pun telah melarangnya secara tegas. Ketika nafsu manusia tunduk kepada semua itu, ia akan menghadapi berbagai kesulitan karena ketamakanya yang tidak mengenal cukup dan batas.²⁵

Adapun suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Suami wajib memenuhi kebutuhan dapur, yakni memenuhi kebutuhan belanja pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah walaupun istri bekerja hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian keluarga. Jika suami tidak menghendaki istri bekerja maka ia harus mentaatinya.²⁶

2. Pemberian Nafkah Menurut Hukum Positif

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 78 Ayat 1 yang berbunyi “ suami istri memunyai tempat kediaman yang tetap “. Dan dalam Pasal 81 Ayat 1

²⁴ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amza, 2009), 187.

²⁵ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, 2009), 216.

²⁶ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.SI., *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 33.

papan.²⁷ Namun yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan keperluan keluarga.²⁸ Lalu banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban.²⁹

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu nafkah materil dan nafkah non materil, adapun yang termasuk nafkah materil adalah nafkah pakaianh dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya, biaya pendidikan bagi anak³⁰

Kemudian nafkah non materil adalah berlaku sopan antara suami maupun istri, memberikan perhatian baik suami maupun istri, berlaku setia, saling mengingatkan dalam hal kebaikan³¹.

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak didapati istilah nafkah.³² Walaupun tidak ditemukan istilah nafkah tetapi sebelumnya didalam salah satu pasal di Undang-undang tersebut mengatur tentang masalah nafkah. Tetapi Undang-undang Perkawinan tersebut tidak mengatur secara khusus

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graba Ilmu, 2011), 75.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido Bnadung Anggota IKAPI, 2012), 421.

²⁹ Ibid., 421.

³⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), 152.

³¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

³² Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 411.

